



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LKjIP )**  
**TAHUN 2021**

**KECAMATAN HARAU**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) KECAMATAN HARAU TAHUN  
2021



## KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Harau telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 060/521/Org-LK/2021 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Harau Tahun Anggaran 2021. LKjIP Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan

kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam menyampaikan laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Tanjung Pati, Februari 2022  
**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Harau Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan permasalahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asa keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentag Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyesuaian Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Kecamatan Harau merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016-2021 yang sangat menentukan dalam

meningkatkan kinerja Kecamatan Harau dengan memuat 1 (satu) pernyataan visi, 2 (dua) pernyataan misi yang diemban serta 4 (empat) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2021 terdapat 6 program dan 14 kegiatan urusan pemerintahan dan 37 Sub Kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2021 yang tersedia setelah adanya perubahan sebesar Rp. 2.104.281.873 yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Dari evaluasi Kinerja secara mandiri yang ditetapkan seluruhnya capaian kinerja mencapai 100%.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel.....	ii-iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I : PENDAHULUAN	1-7
1.1.    Gambaran Umum	1
Organisasi.....	2-4
1.2. Struktur Organisasi.....	4-5
1.3. Sumberdaya Pegawai/Aparatur.....	
1.4. Isu-isu Strategis dan permasalahan Umum yang di hadapi.....	6 7
1.5.    Sistematika Penulisan.....	
Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja	8-18
2.1. Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Harau.....	8-15
2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....	15-16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	16-18
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	19-57
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja....	19-20
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	20-22
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	22-38
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	39-55
3.5. Hasil Tindak Lanjut LHE Inspektorat.....	56
3.6. Prestasi dan Penghargaan .....	57
Bab IV : PENUTUP	58-60
4.1. Kesimpulan.....	58-59
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	59-60
Lampiran	
Lampiran	



## DAFTAR TABEL

1	Sumberdaya Manusia Berdasarkan Eselon/Struktural/THL.....	5
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
3	Hubungan Hirarkis visi, misi tujuan strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Harau.....	12-13
4	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	14-15
5	Renja Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2020 .....	16
6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	17
7	Klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja .....	20
8	Capaian Indiktor Kinerja Utama tahun 2020 .....	21
9	Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja .....	22
10	Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan publik .....	23
11	Data Responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan jenis layanan .....	24-25

12	Sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari .....	28
13	Nagari berstatus berkembang dan maju .....	29
14	Sasaran strategis meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari .....	32
15	Anggaran sebelum dan sesudah perubahan .....	43-47
16	Realisasi dan efisiensi anggaran .....	48-55



## DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Kecamatan Harau .....	4
2	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2018 dan 2019 ...	23
3	Target dan Realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dan 2020 .....	26
4	Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan kantor camat.....	27
5	Pelayanan terpadu kecamatan.....	28
6	Target dan Realisasi Persentase Nagari yang berstatus berkembang dan maju .....	29
7	Evaluasi APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Harau .....	31
8	Target dan Realisasi Persentase APB Nagari yang tepat waktu ...	31
9	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Harau kecamatan Harau .....	32-33
10	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Taram kecamatan Harau .....	34-35
0	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Pilubang kecamatan Harau .....	36-37
11	Target dan Realisasi Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif .....	38

---

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2021. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan

---

indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

## **1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Harau sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

---

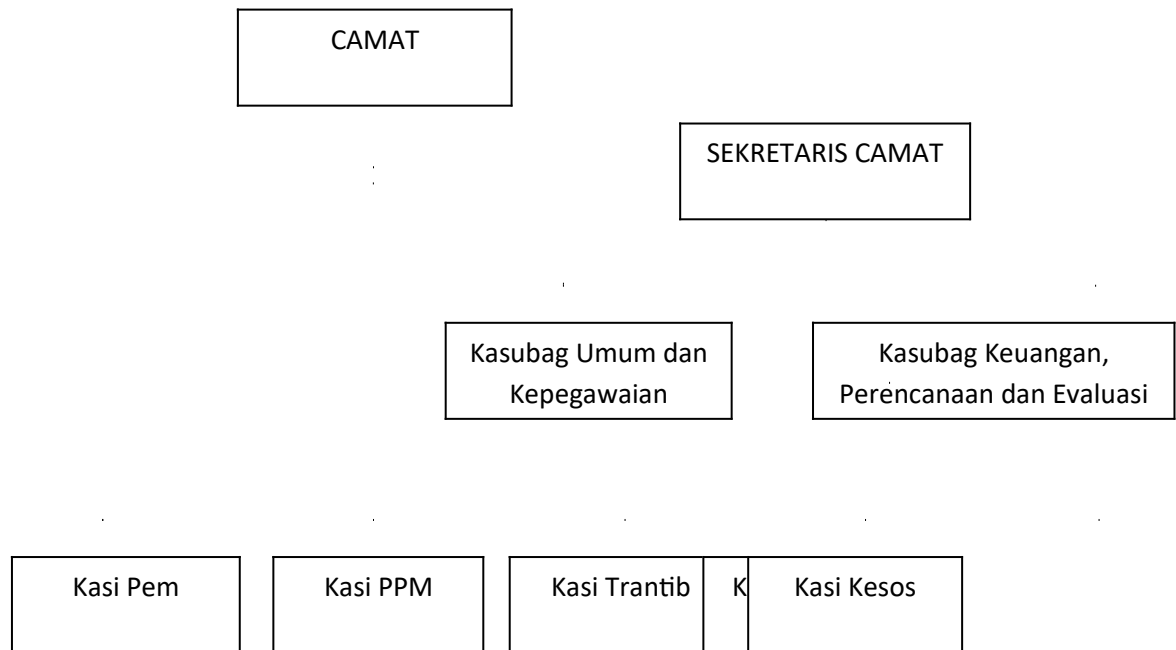
## 1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

*Fungsi Camat :*

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Harau dapat di lihat pada tabel Struktur seperti dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Harau

### 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

**Tabel 1.1 Sumberdaya Manusia berdasarkan  
Eselon/Struktural/fungsional/Tenaga Haria Lepas  
(THL)**

<b>No</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah Pegawai (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	5	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	13	
6	PTT	1	
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel: 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	3	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	7	
3	D IV	1	
4	D III	2	
5	SLTA	12	



6	SLTP	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor  
Camatharau)

#### **1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.**

Kecamatan Harau berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010-2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat. Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
  - Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
  - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
  - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.

- 
- Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) OPD
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. TINDAK LANJUT LHE ISPEKTORAT
- 3.6 DAFTAR PRESTASI

### **BAB IV : PENUTUP**

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

---

---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) OPD**

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

##### **2.1.1. VISI**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, "visi adalah rumusan umum

---

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu”. Visi dan misi OPD ini harus sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Visi :”Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

### **2.1.2. MISI**

Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan harau merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai unit kerja induk bagi Kecamatan harau.

---

---

Dari Visi dan Misi Kabupaten tersebut dapat dijabarkan pula misi Kabupaten sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf/kualitas hidup Masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta Gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Masjid, MDA,TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

- 
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan jaminan Penjurangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
  6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
  7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat bergama.
  8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan pererangkat lunak.
  9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah basis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak Nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

### **2.1.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Harau yang selaras dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Lima Puluh Kota, berserta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel. 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021)

<b>VISI No. IV: Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.</b>			
<b>MISI I: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis</li> <li>- Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait .</li> </ul>
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik</li> <li>- Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan</li> </ul>
		2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik</li> <li>- Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.</li> </ul>

<b>VISI No. IV: Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.</b>			
<b>MISI I: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>MISI II : Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)	Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
		Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari</li> <li>- Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari</li> </ul>
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.	Menfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat



Tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dinamis, serta koordinasi dengan unit kerja lain yang lancar dan mantap dengan melibatkan masyarakat sehingga memperoleh data yang aktual dan faktual
- b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif aparatur pemerintah, masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada di kecamatan yang mendukung program Pemerintah sehingga tercipta Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan**

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau
				Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Memperkuat Kelembagaan	Meningkatkan Kualitas	Persentase nagari yang berstatus	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Jumlah nagari yang berstatus

2		an Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong	Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	berkembang dan maju di Kecamatan Harau	Pemerintahan Nagari	berkembang dan maju di Kecamatan Harau
						Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
					Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Harau Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kinerja Kecamatan Harau tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini.

**Tabel 2.3 Renja Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Harau Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatanharau	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan harau	10 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	75%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	92%

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Harau Tahun 2021 yang ditetapkan pada awal tahun 2021 berpedoman pada Renstra Kecamatan Harau Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Kecamatan Harau Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Harau Tahun 2016-2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Harau Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Harau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel : 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KECAMATAN HARAU**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	10 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	75%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	92%

**Program**

**Anggaran**

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.026.959.973
2	Program Penyelenggaraan	Rp	21.150.000

---

Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	19.093.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	11.397.400
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	9.395.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	16.286.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>2.104.281.873</b>

---

---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

**Tabel. 3.1.**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis**  
**dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Kode
1	91% - 100%	Sangat Tinggi	
2	76% - 90%	Tinggi	
3	66% - 75%	Sedang	
4	51% - 65 %	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Harau telah menetapkan Indikator Kinerja Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Harau Tahun 2016-2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Harau tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Indikator Utama Kecamatan Harau Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021			Kode
		Target	Realisasi	%Capaian	
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	%	75	64,58	86,11%	
2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	88,61	110,77 %	
3 Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	%	10 Nagari	9 Nagari	90 %	
4 Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	%	75%	36,36%	48,48%	
5 Persentase Badan Usaha Milik	%	92%	72,73%	79,05%	



INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			Kode
Nagari yang aktif					

Dari hasil pengukuran diatas, rata-rata capaian indikator kecamatan harau tahun 2021 berada pada posisi sangat tinggi, hanya saja untuk indikator pertama yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan harau belum mencapai 100% dikarenakan nilai sakip kecamatan harau tahun 2021 hanya 64,58 sedangkan target awalnya 75 sehingga persentase capaian untuk indikator tersebut sebesar 86,11% masuk dalam kategori tinggi.

### 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :

**MISI I :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik**

#### **Sasaran Starategis 1.1 : Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan harau**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	75	73	64,58	75	-	

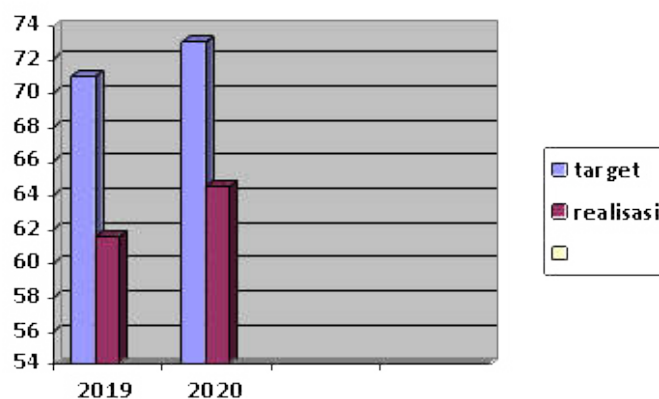
Berdasarkan hasil penilaian Sakip Kecamatan Harau tahun 2020 kecamatan harau memperoleh nilai sebesar 64,58.

---

Berikut hasil evaluasi inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap sakiip kecamatan harau tahun 2020 yaitu:

- Kecamatan Harau telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan dan renstra sudah di publikasikan, namun belum direviu secara berkala.
- Renstra telah memuat ukuran keberhasilan walau belum sempurna belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
- Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai kinerja atasannya.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala ( Bulanan/triwulan/semester)
- Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari eselon IV keatas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Laporan Kinerja telah di *upload* ke dalam *website*, namun belum di *reviu* secara berkala.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan belum berkesinambungan.
- Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga tidak bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode.
- Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya, serta informasi kinerja dapat diandalkan.

**Grafik 1 : Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020**



### Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	79	88,47	80	88,61	

#### Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 88,61 yaitu dari target yang di rencanakan adalah 80 dengan capaian realisasi sebesar 110,77%.

Dari Pelaksanaan Survey selama 12 Bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 620 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

---

Dari 620 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut :

**a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	323
Perempuan	297
Tidak diketahui	-
Jumlah	620

Tabel 1. Jenis Kelamin

**b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Responden
SD	58
SLTP	67
SLTA	337
DIII	15
S1	136
S2	7
Tidak diketahui	-
Jumlah	620

Tabel 2. Berdasarkan Pendidikan

**c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima**

Layanan yang diterima	Responden
KK	164
KTP	53
Surat pindah	37
Poli Umum	366

Jumlah	620
--------	-----

Tabel 3. Berdasarkan Jenis Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus :

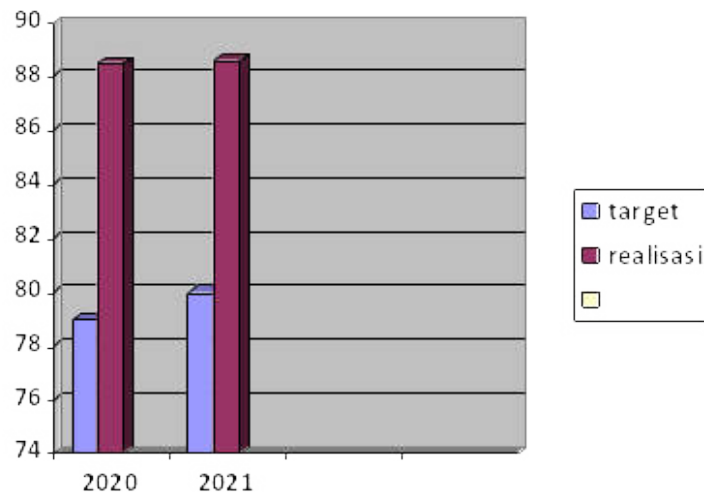
$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

---

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Grafik 2 : Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan Tahun 2021**



**Gambar 1. Kotak Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kantor Camat**



**Gambar 2: Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan harau**



**MISI II : Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong**

**Sasaran Strategis 3.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	10 Nagari	9 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	9 Nagari	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	75 %	50%	30%	75 %	36,36%	

**a. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju.**

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau di tahun 2021 adalah 9 Nagari dari 11 nagari di Kecamatan Harau, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 90% dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 9 nagari dari target awal sebanyak 10 nagari. Berikut daftar nagari berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau tahun 2021 yaitu;

**Tabel 3.2 Nagari Berstatus berkembang dan maju di kecamatan harau**

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Bukik Limbuku	Berkembang
2	Harau	Maju



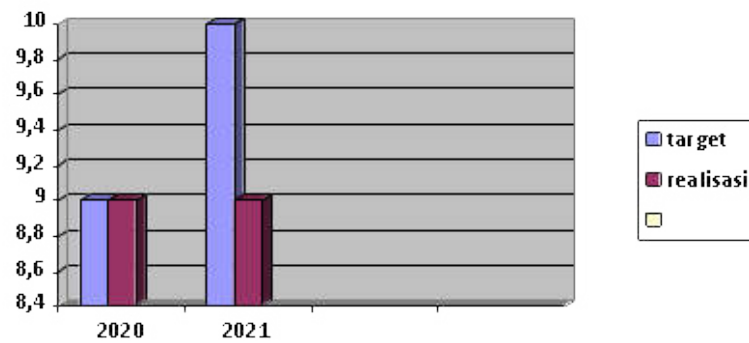
3	Lubuak Batingkok	Maju
4	Pilubang	Berkembang
5	Solok Bio-Bio	Berkembang
6	Tarantang	Maju
7	Batu Balang	Maju
8	Gurun	Maju
9	Koto Tuo	Maju
10	Sarilamak	Mandiri
11	Taram	Mandiri

*Data Indeks Indonesia Membangun (IDM) Tahun 2021*

Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang di rencanakan dikarenakan :

1. Nagari yang berstatus berkembang dan maju dengan artian masyarakatnya sudah kreatif dan kritis serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan Nagari.
2. Nagari yang berstatus berkembang dan maju memiliki letak lokasi yang dekat dengan kota sehingga nagari memiliki berbagai pilihan bagi masyarakatnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Nagari yang berstatus berkembang dan maju memiliki penduduk yang padat.

**Grafik 3 : Target dan Realisasi Persentase Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau**



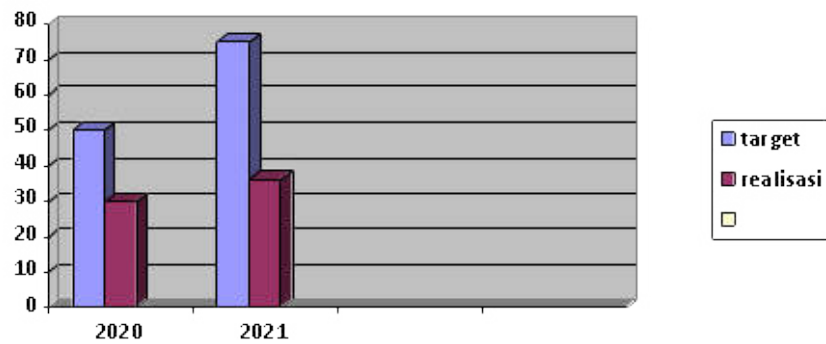
### **b. Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu**

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu dengan capaian realisasi untuk tahun 2020 sebesar 100 % dengan target awal tahun 2020 sebesar 50% terealisasi sebesar 30 % yaitu sebanyak 3 nagari. Nagari tersebut adalah Nagari Sarilamak, Harau dan Taram. Untuk tahun 2021 jumlah nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu hanya 4 Nagari ( Nagari Lubuak Batingkok, Sarilamak, Harau dan Taram) sehingga realisasi tahun 2021 sebesar 36,36% belum mencapai target.

**Gambar 3: Evaluasi APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan harau.**



**Grafik 4: Target dan Realisasi Persentase APB Nagari yang tepat waktu di Kecamatan Harau.**



## Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	92%	75%	54,54%	92%	72,73%	

### a. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 72,73 % yaitu ada 8 (delapan) Nagari yang Bumagnya aktif yaitu Nagari Taram, Nagari Solok bio-bio, Nagari Harau, Nagari Pilubang, Nagari Sarilamak, Nagari Tarantang, Nagari Bukik Limbuku dan Nagari Lubuak Batingkok.

**Gambar 4: Home Stay yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Harau**





**Gambar 5: Objek Wisata Aia Malanca yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Harau**



---

**Gambar 6: Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Taram minyak serai wangi**



---

**Gambar 7 : Pertashop yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Taram**



**Gambar 8 : Jala Apung yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Taram**

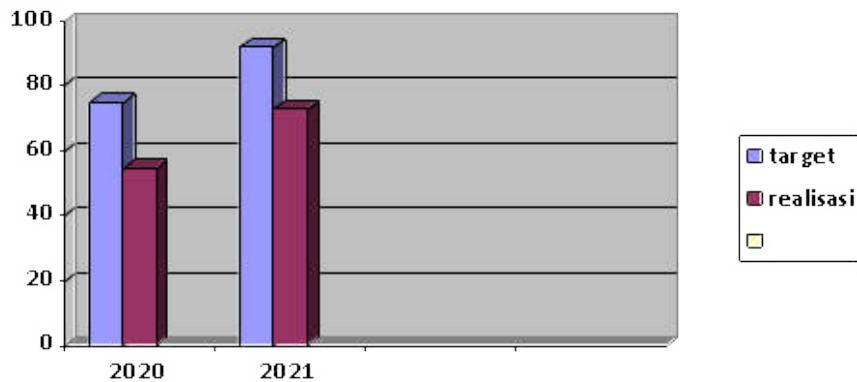


**Gambar 9 : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Salingka Bukik Nagari Pilubang**





**Grafik 5 : Target dan Realisasi Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif**



### 3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

### 3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang

pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

### 3.3.3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/PROGRAM/
				KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Harau	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	64,58%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

				Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan mebel
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,61%</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>

				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari</b>	<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan harau</b>	<b>90%</b>	<p><b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b></p> <p><b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b></p> <p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p><b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b></p> <p><b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b></p> <p>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p><b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b></p> <p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p><b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b></p> <p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b></p>

		<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>36,36%</b>	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b> <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari</b>	<b>Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif</b>	<b>72,73 %</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

### 3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Kecamatan Harau merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dengan melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan urusan pemerintahan dan 37 Sub Kegiatan. Dengan anggaran belanja

operasional **Rp. 2.104.281.873.-** dan realisasi belanja **Rp. 2.074.273.865,-** atau **98,57 %**.

Berikut anggaran tahun 2021 setelah perubahan serta realisasi dan efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.4 Anggaran sebelum dan setelah perubahan**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN AWAL</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI PERUBAHAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.195.817.215</b>	<b>2.026.959.973</b>	<b>2.005.347.865</b>
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.186.400</b>	<b>5.817.100</b>	<b>5.790.100</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.005.000	1.037.700	1.032.700
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.018.800	271.400	271.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.014.000	211.400	211.400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.035.200	1.035.200	1.032.200
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.081.700	969.200	967.200
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.031.700	2.292.200	2.275.200
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.777.899.815</b>	<b>1.758.258.073</b>	<b>1.741.410.605</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.770.588.015	1.751.177.473	1.735.285.005
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.162.700	3.303.600	3.296.600
3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.084.800	1.084.800	1.084.800
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1.054.200	1.682.400	1.345.400



	Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.010.100	1.009.800	398.800
<b>c</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.062.000</b>	<b>740.300</b>	<b>735.300</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.062.000	740.300	735.300
<b>d</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.535.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.529.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	11.000.000	-	-
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.535.000	1.535.000	1.529.000
<b>e</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>119.544.400</b>	<b>83.463.200</b>	<b>79.603.200</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.188.000	1.503.000	1.503.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.250.000	27.000.000	27.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.600.000	15.632.500	15.632.500
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.605.400	9.537.800	9.537.700
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000	8.250.000	8.250.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.001.000	21.540.000	17.680.000
<b>f</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.000.000</b>	-	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	-	-
2	Pengadaan mebel	12.000.000	-	-
<b>g</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.941.600</b>	<b>109.659.200</b>	<b>109.106.160</b>
1	Penyediaan Jasa Surat	2.802.000	1.500.000	1.500.000

	Menyurat			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	24.360.000	14.435.000	13.882.460
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.779.600	93.724.200	93.723.700
<b>h</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.648.000</b>	<b>67.487.000</b>	<b>67.173.500</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.900.000	58.355.000	58.353.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	6.900.000	6.900.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.748.000	2.232.000	1.920.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>31.291.200</b>	<b>21.150.000</b>	<b>21.090.000</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>19.551.800</b>	<b>13.230.000</b>	<b>13.175.000</b>
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.551.800	13.230.000	13.175.000
<b>b</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>	<b>11.739.400</b>	<b>7.920.000</b>	<b>7.915.000</b>
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.739.400	7.920.000	7.915.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>45.089.100</b>	<b>19.093.000</b>	<b>18.956.000</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>45.089.100</b>	<b>19.093.000</b>	<b>18.956.000</b>
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan	22.390.500	14.428.000	14.311.000

	Pembangunan di Desa			
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.698.600	4.665.000	4.645.000
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18.824.900</b>	<b>11.397.400</b>	<b>4.010.000</b>
<b>a</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.087.500</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.087.500	4.700.000	0
<b>b</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>9.737.400</b>	<b>6.697.400</b>	<b>4.010.000</b>
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.737.400	6.697.400	4.010.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>30.467.000</b>	<b>9.395.000</b>	<b>9.345.000</b>
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>30.467.000</b>	<b>9.395.000</b>	<b>9.345.000</b>
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	14.232.500	3.840.000	3.835.000
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.234.500	5.555.000	5.510.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>79.105.800</b>	<b>16.286.500</b>	<b>15.525.000</b>

a	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>79.105.800</b>	<b>16.286.500</b>	<b>15.525.000</b>
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	5.956.800	3.976.500	3.535.000
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.505.400	5.490.000	5.480.000
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.036.100	3.820.000	3.735.000
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	35.118.900	-	-
5	Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif	6.981.900	3.000.000	2.775.000
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.028.300	-	-
7	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.478.400	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.400.595.215</b>	<b>2.104.281.873</b>	<b>2.074.273.865</b>

**Tabel : 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran**

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN Rp	% REALISASI	% CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Harau	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	64,58%	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.026.959.973</b>	<b>2.005.347.865</b>	<b>98,93%</b>	<b>86,11%</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.817.100</b>	<b>5.790.100</b>	<b>99,54</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.037.700	1.032.700	99,52	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	271.400	271.400	100	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	211.400	211.400	100	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.035.200	1.032.200	99,71	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	969.200	967.200	99,79	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.292.200	2.275.200	99,26	75	Efisien

				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.758.258.073</b>	<b>1.741.410.605</b>	<b>99,04%</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.751.177.473	1.735.285.005	99,09	75	Efisien
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.303.600	3.296.600	99,79	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.084.800	1.084.800	100	75	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.682.400	1.345.400	79,97	75	Efisien
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.009.800	398.800	39,49	75	Efisien
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>740.300</b>	<b>735.300</b>	<b>99,32</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	740.300	735.300	99,32	75	Efisien
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.529.000</b>	<b>99,61</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	0	0	0	75	Efisien
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.535.000	1.529.000	99,61	75	Efisien
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>83.463.200</b>	<b>79.603.200</b>	<b>95,38</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.503.000	1.503.000	100	75	Efisien
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	27.000.000	100	75	Efisien
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.632.500	15.632.500	100	75	Efisien
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.537.800	9.537.700	100	75	Efisien
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000	8.250.000	100	75	Efisien
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.540.000	17.680.000	82,08	75	Efisien
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	0	0	0	75	Efisien

				Kendaraan Dinas Jabatan					
				Pengadaan mebel	0	0	0	75	Efisien
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.659.200</b>	<b>109.106.160</b>	<b>99,50</b>	<b>75</b>	<b>Efisien</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100	75	Efisien
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	14.435.000	13.882.460	96,17	75	Efisien
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.724.200	93.723.700	100	75	Efisien
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88,61%</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.487.000</b>	<b>67.173.500</b>	<b>99,54</b>	<b>110,77</b>	Efisien
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.355.000	58.353.500	100	100	Efisien
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.900.000	100	100	Efisien
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.232.000	1.920.000	86,02	100	Efisien



				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>21.150.000</b>	<b>21.090.000</b>	<b>99,72</b>	<b>110,77</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>13.230.000</b>	<b>13.175.000</b>	<b>99,58</b>	<b>110,77</b>	<b>Efisien</b>
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.230.000	13.175.000	99,58	110,77	Efisien
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan</b>	<b>7.920.000</b>	<b>7.915.000</b>	<b>99,94</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.920.000	7.915.000	99,94	100	Efisien
		<b>Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan harau</b>	<b>90%</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>19.093.000</b>	<b>18.956.000</b>	<b>99,28</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>19.093.000</b>	<b>18.956.000</b>	<b>99,28</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum	14.428.000	14.311.000	99,19	100	Efisien

3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.665.000	4.645.000	99,57	100	Efisien	
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>11.397.400</b>	<b>4.010.000</b>	<b>35,18</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>	
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4.700.000</b>	0	0	100	Efisien	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.700.000	0	0	100	Efisien	
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>6.697.400</b>	<b>4.010.000</b>	<b>59,87</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>	
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	6.697.400	4.010.000	59,87	100	Efisien	

				Indonesia					
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>9.395.000</b>	<b>9.345.000</b>	<b>99,47</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>9.395.000</b>	<b>9.345.000</b>	<b>99,47</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
		<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>36,36%</b>	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.840.000	3.835.000	99,87	100	Efisien
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.555.000	5.510.000	99,19	100	Efisien
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>16.286.500</b>	<b>15.525.000</b>	<b>95,32</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>16.286.500</b>	<b>15.525.000</b>	<b>95,32</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>
				Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan	3.976.500	3.535.000	88,90	100	Efisien

				peraturan Kepala Desa					
				Fasitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.820.000	3.735.000	97,77	100	Efisien
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari</b>	<b>Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif</b>	<b>72,73 %</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.490.000	5.480.000	99,82	100	Efisien
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	100	Efisien
				Fasitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif	3.000.000	2.775.000	92,50	100	Efisien
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	100	Efisien
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	Efisien
	<b>TOTAL ANGGARAN SELURUHNYA</b>				<b>2.104.281.873</b>	<b>2.074.273.865</b>	<b>98,57</b>	<b>100</b>	<b>Efisien</b>

---

### 3.5 HASIL TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT

Beberapa evaluasi inspektorat terhadap Laporan kinerja kecamatan Harau yaitu:

- Kecamatan Harau telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan dan renstra sudah di publikasikan, namun belum direviu secara berkala.
- Renstra telah memuat ukuran keberhasilan walau belum sempurna belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
- Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai kinerja atasannya.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala ( Bulanan/triwulan/semester)
- Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari eselon IV keatas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Laporan Kinerja telah di *upload* ke dalam *website*, namun belum di *reviu* secara berkala.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan belum berkesinambungan.
- Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga tidak bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode.
- Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya, serta informasi kinerja dapat diandalkan.

---

### **3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Sepanjang tahun 2021 Kecamatan Harau belum mendapatkan penghargaan ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi Sumatera Barat.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1. KESIMPULAN**

Pada tahun 2021 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 ( empat ) sasaran dengan 5 ( lima ) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Tahun 2021			Kode
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau	%	75	64,58	86,11%	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	88,61	110,77 %	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	%	10 Nagari	9 Nagari	90 %	
		Persentase Nagari yang	%	75%	36,36 %	48,48%	

N	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Tahun 2021			Kode
o.	STRATEGIS	KINERJA menetapkan APB Nagari tepat waktu					
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	%	92%	72,73%	79,05%	

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatanharau Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

#### **4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG**

Disadari bahwa selama Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan harau mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Harau melalui perhitungan survey kepuasan masyarakat dengan menganalisa unsur



- 
- unsur pelayanan yang kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
  - b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan nagari dalam hal peningkatan pembangunan dalam mendorong desa maju dan berkembang di Kecamatan Harau dengan pengawasan perencanaan sesuai dengan program dan kegiatan prioritas desa membangun.
  - c. Mendorong pembinaan dan pengawasan untuk mempercepat penyampaian APB Nagari sehingga target dari kecamatan tercapai.
  - d. Mendorong pembentukan dan pengembangan BUMNAG Nagari melalui pelatihan dan pembinaan.
  - e. Meningkatkan nilai AKIP yang direview oleh inspektorat agar tercapainya target.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan harau akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.

Tanjung Pati, Februari 2022

**CAMAT HARAU**

**ANDRI YASMEN, S.Sos**  
NIP. 19720920 199202 1 001